



RILIS
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT. INDOFARMA TBK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025
TANGGAL 13 – 15 SEPTEMBER 2024

Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 sampai dengan 15 September 2024. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI tersebut dipimpin oleh Bapak Martin Manurung, S.E., M.A. selaku Pimpinan/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Dalam kunjungan tersebut dihadiri Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN RI, Pendamping Asdep Industri kesehatan Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Human Capital PT Bio Farma (Persero), Komisaris Utama PT Indofarma (Persero) Tbk., Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk., Direktur Operasional PT Indofarma (Persero) Tbk. serta jajaran direksi sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Secara umum, kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka Peninjauan Kinerja Operasional PT.Indofarma (Persero) Tbk di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam sesi ini, mitra kerja Kementerian BUMN RI, PT Bio Farma (Persero) dan PT Indonesia Farma (Persero) Tbk. menyampaikan paparannya terkait beberapa hal diantaranya yakni Kinerja Operasional PT. Indofarma Tbk, permasalahan yang dihadapi PT. Indofarma Tbk, perencanaan sikap atau skema solutif yang akan dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan, penanganan permasalahan pemenuhan hak-hak karyawan seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, serta pesangon para pensiun yang belum dibayarkan, tindakan hukum yang akan dilakukan Kementerian BUMN RI terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat yang diduga melakukan *Fraud* di dalam BUMN Farmasi dan penjelasan terkait strategi dan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional melalui penyediaan obat dan alat kesehatan untuk masyarakat Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, maka Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI, PT. Bio Farma (Persero), dan PT. Indofarma Tbk untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan, menyelesaikan pemenuhan hak-hak karyawan seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, serta pesangon para pensiunan PT. Indofarma Tbk dan meminta agar dilakukan strategi pemulihan baik dengan skema perencanaan bisnis, skenario penyesuaian dengan mencari investor strategis dan melakukan adaptasi secara efektif.

Kemudian Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk segera melakukan tindakan hukum terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat yang diduga melakukan *Fraud*, mendorong PT. Indofarma Tbk untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memproduksi kebutuhan medis yang diperuntukkan Masyarakat kelas menengah kebawah, dan memaksimalkan kinerja satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk untuk merestrukturisasi dan menyembuhkan BUMN Farmasi yang sakit, serta mendorong Kementerian BUMN RI untuk melakukan audit berkala kepada BUMN Farmasi penerima PMN.

Disamping itu, Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Holding BUMN Farmasi (PT. Bio Farma) untuk kembali ketujuan awal pembentukannya yaitu memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk, dan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi memiliki industri hulu untuk mengurangi potensi produk impor.

Bekasi, 15 September 2024
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI
Ke Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.